



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024  
KE PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2023**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024**  
**KE PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
**5-9 OKTOBER 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 25 September 2023.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 21 Agustus 2023.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Papua Barat Daya adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Papua Barat Daya adalah untuk:

1. Mendapatkan informasi secara langsung terkait pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan/Pangkalan Pendaratan Ikan, pengembangan desa nelayan, monitoring pasokan beras terutama beras untuk program bantuan pangan, pelaksanaan reklamasi, pengelolaan konservasi, rencana pembangunan Sekolah Menengah Kehutanan, dan pengembangan budi daya cabai merah.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan Pertanian, Pangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kelautan dan Perikanan yang didanai oleh APBN, APBD, atau sumber sumber anggaran lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang;
3. Mendapatkan data dan informasi sebagai bahan pembahasan dengan Mitra Komisi IV DPR pada masa persidangan yang akan datang.
4. Menyerap aspirasi dari masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan.

### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Papua Barat Daya dipimpin oleh Bapak Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) dan diikuti oleh Para Anggota Komisi IV DPR RI.

### **E. WAKTU DAN TEMPAT**

1. Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 9 Oktober 2023;
2. Tempat kunjungan kerja di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.

### **F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

Lokasi kunjungan kerja Tim Komisi IV DPR RI di Provinsi Papua Barat Daya yakni;

1. TPI Klaligi dan Kampung Nelayan Jembatan Puri, Kota Sorong.
2. Gudang Bulog Klaligi, Kota Sorong.

3. Lokasi Reklamasi Sorong Modern City.
4. TWA Kota Sorong, Papua Barat Daya.
5. Kawasan budi daya Cabai Merah di Kelurahan Jaimamo, Kecamatan/Distrik Mariat, Kabupaten Sorong.

## **G. GAMBARAN UMUM LOKASI KUNJUNGAN**

### **Profil Kota Sorong**

Sorong adalah ibukota Provinsi Papua Barat Daya. Kota ini dikenal dengan sebutan Kota Minyak, dimana *Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij* (NNGPM) mulai melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di Sorong sejak tahun 1935. Luas wilayah Kota Sorong mencapai 1.105,00 km<sup>2</sup> atau sekitar 1.13% dari total luas wilayah Papua Barat. Wilayah kota ini berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut. Keadaan topografi Kota Sorong sangat bervariasi terdiri dari pegunungan, lereng, bukit-bukit dan sebagian adalah dataran rendah, sebelah timur di kelilingi hutan lebat yang merupakan hutan lindung dan hutan wisata.

Sorong adalah kota terbesar kedua di Pulau Papua Indonesia, setelah Kota Jayapura, lokasinya sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit. Selain itu, merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, karena Kota Sorong dikelilingi oleh kabupaten lain yang mempunyai sumber daya alam yang sangat potensial sehingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi.

Komoditas unggulan Kota Sorong yaitu sektor pertanian, perkebunan, kelautan perikanan, kehutanan, perhubungan dan jasa. Sub sektor perkebunan komoditas yang diunggulkan berupa Kakao, Kelapa dan cengkih. Adapun Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya. Sementara untuk kelautan perikanan mempunyai akses penyebrangan Pelabuhan Sorong (*port of sorong*) dan 1 bandar udara, yaitu Bandar Udara Domine Eduard Osok. Kota Sorong tidak hanya menjadi penghubung atau pusat pertemuan arus transportasi barang, orang dan jasa tetapi juga sebagai pusat transaksi jual beli barang dan jasa seperti hasil perikanan laut, hasil hutan, hasil pertanian tanaman pangan, hasil perkebunan, jasa angkutan umum, jasa wisata dan lain-lain.

Hasil potensi sumber daya alamnya diangkut dari beberapa daerah kabupaten disekitar kota Sorong. Salah satu hasil produksi sebagaimana tersebut diatas adalah ikan laut hasil tangkapan nelayan dari kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Manokwari. Potensi produksi ikan laut hasil tangkap ini diangkut dan di jual di beberapa kab/kota sekitar Kota Sorong. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sorong dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 nilainya telah mencapai sekitar Rp 15,1 triliun. Besar kecilnya perkembangan PDRB Kota Sorong berpengaruh terhadap besar kecilnya sumbangan PDRB Kota Sorong terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat.

### **Profil Kabupaten Sorong**

Kondisi Geografis Kabupaten Sorong terletak di bagian barat Provinsi Papua Barat Daya dengan luas wilayah setelah pembentukan Kabupaten Tanbrauw sebesar 13.075,28 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam wilayah daratan seluas 8.457 km<sup>2</sup> dan wilayah lautan seluas 4.618,28 km<sup>2</sup>. Letak geografis Kabupaten Sorong adalah 30° 40' 49" – 132° 13' 48" BT dan 00° 33' 42" – 01° 35' 29" LS. Wilayah administrasinya terdiri dari 19 distrik, 18 kelurahan dan 149 desa/kampung.

Adapun batas-batas wilayah secara geografis adalah sebagai berikut: Sebelah Selatan: Laut Seram Sebelah Barat : Kota Sorong, Raja Ampat dan Laut Seram Sebelah Utara: Samudera Pasifik dan Selat Dampir Sebelah Timur: Kab. Tambrauw dan Kab. Sorong Selatan.

Mengacu pada data BPS tahun 2022, secara umum wilayah Sorong memiliki tingkat kelembaban udara rata-rata 84% dengan suhu rerata sebesar 270 C dan jumlah curah hujan rata-rata adalah 318,9 mm. Hal ini menjadikan Sorong memiliki potensi pertanian yang laus sepanjang tahun untuk komoditas Tanaman Pangan seperti Padi dan Palawija serta sentra Hortikultura seperti sayuran, bawang merah hingga aneka cabai. Berdasarkan data *early warning system* (EWS) bulan Oktober hingga Desember, ketersediaan cabai baik cabai besar maupun cabai rawit di Provinsi Papua Barat Daya pada rerata mengalami defisit.

*Early Warning System* Cabai Rawit Provinsi Papua Barat Daya Bulan September-Desember 2023:

No	Kabupaten	OKTOBER 2023 (Ton)			NOVEMBER 2023 (Ton)			DESEMBER 2023 (Ton)		
		Kebutuhan	Produksi	Neraca Bulanan	Kebutuhan	Produksi	Neraca Bulanan	Kebutuhan	Produksi	Neraca Bulanan
1	SORONG SELATAN	4	22	18	4	62	59	4	72	68
2	SORONG	56	86	30	54	29	-26	57	26	-30
3	RAJA AMPAT	11	2	-10	11	11	0	11	6	-6
4	TAMBRAUW	15	0	-15	15	1	-13	15	1	-14
5	MAYBRAT	8	1	-7	8	0	-8	8	0	-8
6	KOTA SORONG	61	5	-56	59	3	-56	61	3	-58
<b>TOTAL</b>		<b>156</b>	<b>116</b>	<b>-40</b>	<b>151</b>	<b>107</b>	<b>-44</b>	<b>157</b>	<b>109</b>	<b>-48</b>

Sumber: Ditjen Hortikultura

Keterangan:

a. Produksi: Bulan Januari-Juli berdasarkan SPH per 4 Oktober 2023, Bulan Agustus-Oktober berdasarkan penghitungan LIT Bulan Februari-Juli 2023, Bulan November-Desember berdasarkan rerata ATAP 5 tahun (2018-2022)

b. Kebutuhan cabai rawit sebesar 922,56 ribu ton terdiri dari: (1) Konsumsi rumah tangga (jumlah penduduk per kabupaten dikalikan konsumsi per kapita cabai rawit per kabupaten tahun 2022); (2) Kebutuhan Horeka dan Warung/PKL sebesar 34 % dikalikan jumlah konsumsi langsung (Asumsi Ditjen Horti 2020); (3) Kebutuhan Industri sebesar 25% dikalikan jumlah konsumsi langsung (Asumsi Ditjen Hortikultura); dan (4) sebaran bulanan berdasarkan koefisien harian Kajian BKP (disesuaikan Bapanas).

Activ

## Early Warning System Cabai Besar Provinsi Papua Barat Daya Bulan September Desember 2023

No	Kabupaten	OKTOBER 2023 (Ton)			NOVEMBER 2023 (Ton)			DESEMBER 2023 (Ton)		
		Kebutuhan	Produksi	Neraca Bulanan	Kebutuhan	Produksi	Neraca Bulanan	Kebutuhan	Produksi	Neraca Bulanan
1	SORONG SELATAN	1	41	40	1	24	23	1	20	19
2	SORONG	10	41	31	10	11	1	10	17	7
3	RAJA AMPAT	3	0	-3	3	0	-3	3	0	-3
4	TAMBRAUW	2	0	-2	2	0	-2	2	0	-2
5	MAYBRAT	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
6	KOTA SORONG	48	0	-48	47	0	-46	48	0	-48
<b>TOTAL</b>		<b>66</b>	<b>83</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>-28</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>-29</b>

Keterangan:

a. Produksi: Bulan Januari-Juli berdasarkan SPH per 4 Oktober 2023, Bulan Agustus-November berdasarkan penghitungan LIT Bulan Maret-Agustus 2023, Bulan Desember berdasarkan rerata ATAP 5 tahun (2018-2022)

b. Kebutuhan cabai besar sebesar 918,72 Ribu ton terdiri dari: (1) Konsumsi rumah tangga (jumlah penduduk per kabupaten tahun 2023 dikalikan konsumsi cabai besar per kapita per tahun); (2) Kebutuhan Horeka dan Warung/PKL sebesar 25% dikalikan jumlah konsumsi langsung (Asumsi Ditjen Horti 2020); (3) Kebutuhan Industri sebesar 20% dikalikan jumlah konsumsi langsung (Asumsi Ditjen Hortikultura); dan (4) sebaran bulanan berdasarkan koefisien harian Kajian BKP (disesuaikan Bapanas).

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### A. TPI Klaligi dan Kampung Nelayan Jembatan Puri, Kota Sorong

#### 1. Sejarah Lahirnya TPI/Jembatan Puri

- Melalui pemekaran pemisahan Kota Sorong dari Kabupaten Sorong pada tanggal 28 Februari 2000 dan pada saat itu perikanan masih bergabung dengan Dinas Pertanian Kota Sorong, cikal bakal jembatan puri pada awalnya dijadikan tempat penjemuran ikan dan empang atau koloam ikan
- Setelah perikanan berpisah dari Dinas Pertanian menjadi Kantor Perikanan Kota Sorong barulah jembatan puri mulai diambil alih fungsinya yang sebelumnya aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sorong
- Setelah menjadi UPTD Kantor Perikanan Kota Sorong mulai dilakukan pengembangan tambatan perahu dan pengembangan penjemuran ikan,

kemudian di lanjutkan dengan pengembangan pembangunan gedung penyimpanan ikan

- d. Dan Setelah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan mulailah melakukan pengembangan TPI ke PPI, membangun sarana prasarana pemenuhan standar PPI yaitu Dermaga, Cold Storage, Pabrik Es, SPDN, Pasar Ikan, Tempat Pendaratan Ikan.
2. Fasilitas Sarana dan Prasarana di PPI Klaligi Kota Sorong
  - a. Luas Area keseluruhan kompleks PPI Klaligi Kota Sorong yaitu : 40.000 M<sup>2</sup>
  - b. Dermaga Beton, Pasar Ikan, SPDN
  - c. Codstorage, Pabrik Es
  - d. Pos Pengawasan, Kantor, Rumah Dinas Pegawai
  - e. Lahan Parkir, Jalan Lingkar Area Kompleks, Cafe, Aula Nelayan
3. Data Nelayan di Kota Sorong
  - a. Estimasi jumlah nelayan keseluruhan = 12.295 Org (OAP = 4.190)
  - b. Jumlah Rumah Tangga Perikanan = 4.850 RTP
4. Produksi Hasil Tangkapan
  - a. Perikanan Tangkap
    - 1) Non Pelabuhan = 12.855,25 Ton
    - 2) Pelabuhan = 44.575,10 Ton
    - 3) Perairan Umum = 25,15 Ton
  - b. Pengolahan dan Daya Saing
    - 1) Pembekuan = 20.095,30 Ton
    - 2) Pemasaran = 7.135,15 Ton
5. Data Kapal Perikanan
  - a. Perahu Tanpa Motor = 361 Unit
  - b. Perahu Motor Tempel = 1.329 Unit
  - c. Kapal ≤ 5 GT = 485 Unit
  - d. Kapal 5 – 10 GT = 325 Unit
  - e. Kapal 11 – 30 GT = 475 Unit
  - f. Kapal ≥ 30 GT = 225 Unit
6. Program Dinas P2KP Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong
  - a. Melakukan pendataan seluruh pelaku usaha perikanan terintegrasi ke Kartu KUSUKA

- b. Membangun sentra-sentra perikanan terintegrasi / by system (Aplikasi) terkoneksi dengan Nelayan yang menangkap ikan di laut
  - c. Merehabilitasi Pelabuhan Perikanan Kab/Kota di Papua Barat Daya (Status Hukum)
  - d. Pembentukan UPTD Kawasan Konservasi yang Baru di Kab. Sorong Selatan
  - e. Melakukan Reklamasi dalam rangka penyiapan sarana penyimpanan ikan berstandar
  - f. Balai sentra pembibitan ikan air tawar dan ikan hias di kabupaten Maybrat
  - g. Mengembangkan Balai Benih Ikan Hidup Air laut dan Ikan Hias di Kota Sorong
  - h. Membangun Pasar Ikan Air Tawar di Kota Sorong
  - i. Membangun Pelabuhan penyangga daerah terluar di Kabupaten Raja Ampat
7. Permasalahan
- a. Penyerahan P3D yang belum terselesaikan dari Papua Barat ke Papua Barat Daya
  - b. Masih banyaknya Nelayan Asli Orang Papua (OAP) yang belum mendapatkan bantuan Sarana prasarana penangkapan ikan (Bodi Perahu + Motor Tempel, Kapal di Bawah 5 GT dan di bawah 10 GT, Pancing dan GPS, Bagan Perahu, Jaring Udang/Alat Tangkap Ikan)
  - c. Kerusakan sebagian atap TPI Klaligi untuk penjualan ikan dan udang yang belum diperbaiki
  - d. Pembangunan kampung nelayan di Jembatan Puri Kota Sorong
  - e. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan ke rumah tangga nelayan di daerah pesisir
8. Tanggapan/Solusi
- a. Perlu ditindaklanjuti dengan Kementerian Dalam Negeri dan instansi lainnya terkait penyerahan/pengalihan aset berupa sarana perasarana Pemerintahan Daerah berbasis regulasi, pegawai/SDM dan lain-lain.
  - b. Perlu ada kehadiran bantuan kepada nelayan melalui program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, c.q Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya saing berupa alat



tangkap ikan, perbaikan atap TPI Klaligi yang rusak, cool box, pembangunan tempat pertemuan di kampung nelayan beserta penerangan listrik dan jalan kampung.

- c. Perlu dilakukan pelatihan/bimtek yang diselenggarakan oleh KKP c.q Direktorat Jenderal Penguatan Daya saing kepada ibu-ibu nelayan/pengolah perikanan Kota Sorong .

## **B. Gudang Bulog Klaligi, Kota Sorong Papua Barat Daya**

Perum Bulog sebagai institusi Negara yang ditugaskan untuk mendistribusikan dan memutus rantai pasokan komoditas beras agar tidak mahal. Untuk itu, harus diingat pentingnya peran dari Perum Bulog yang tidak hanya untuk memenuhi stok pangan saja, namun juga pangan yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus membantu petani. Selanjutnya, Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog agar melakukan operasi pasar melalui gerakan pasar murah harus dikuatkan dan ditingkatkan agar harga beras stabil. Selain itu, perlunya melakukan penguatan satgas ketahanan pangan. Selain beras, hal lain yang juga menjadi persoalan vital dan juga persoalan nasional adalah masalah ketersediaan pupuk, yang tersedia dan terjangkau.



Pada saat kunjungan, diperoleh informasi mengenai persediaan komoditi perum Bulog Kantor Cabang Sorong sebagai berikut:

No	Komoditi	Komplek Pergudangan	Persediaan di Fisik Gudang (KG)	Persediaan di Pelabuhan (KG)	Persediaan Gudang + Pelabuhan	Persediaan Dalam Perjalanan (PDP)	Jumlah Persediaan (KG)
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8 = 6+7
1	ERAS PSO/MEDIUM	Klaligi	1.298.783	1.250.000	2.548.783	7.500.000	10.048.783
		Sapordanco	137.020	250.000	387.020		387.020
<b>JUMLAH BERAS PSO/MEDIUM</b>			<b>1.435.803</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.935.803</b>	<b>7.500.000</b>	<b>10.435.803</b>
2	BERAS KOMERSIL	Klaligi	99.283	-	99.283	-	99.283
3	MINYAK	Klaligi	10.440	20.004,00	30.444	-	30.444
4	GULA	Klaligi	-	-	-	50.000	50.000

Dimana untuk beras PSO/medium berasal dari impor yang rencana pemasukan impor dari Vietnam pada pertengahan Oktober sebanyak 7500 ton. Adapun untuk data penyaluran hingga 3 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

DATA PENYALURAN KANTOR CABANG SORONG & KCP TEMINABUAN PERIODE PENYALURAN 1 JANUARI S.D 3 OKTOBER 2023					
NO	URAIAN	KC SORONG	KCP	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3+4	6
1	Penyaluran Beras SPHP	1.784.250	357.565	2.141.815	
2	Penyaluran Bantuan Pangan Tahap I (1.280.820 Kg) Alokasi	992.280	288.540	1.280.820	Penyaluran 100 % untuk 3 bulan Alokasi
3	Penyaluran Bantuan Pangan	439.350	91.050	530.400	Progres Penyaluran 44 % dari pagu yang
4	PNS Otonom	3.104.150	1.105.420	4.209.570	
5	PNS Vertikal/TNI/Polri	1.360.117	167.022	1.527.139	
6	Pengadaan Beras Komersial	292.310	28.500	320.810	
7	Movenas IN	9.000.000		9.000.000	Penerimaan Beras dari :
8	Movereg	1.250.000		1.250.000	Pengiriman ke :
9	Movelok	800.000			Pengiriman ke Kompleks Pergudangan
10	Rencana Import	9.800.000		9.800.000	Rencana Kedatangan Minggu ke III
<b>JUMLAH</b>		<b>28.822.457</b>	<b>2.038.097</b>	<b>30.060.554</b>	

Pada saat pertemuan, secara khusus disampaikan agar Badan Pangan Nasional harus memiliki system/data pangan yang valid. Selain itu harus ada sinergitas dan kordinasi antar instansi/lembaga terkait berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan pangan, jangan saling menyalahkan.

### C. Lokasi Reklamasi Sorong Modern City

1. Perspektif Analisis Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - a. Sorong Modern City (SMC) berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kotamadya Sorong, Papua Barat 98411.
  - b. Proyek SMC seluas ±19,90 ha dibangun dan dikembangkan oleh PT Moderen Multi Graha.

- c. SMC akan dijadikan kawasan komersial dengan konsep modern dan terpadu. Ruko yang dibangun pada tahap awal ini berjumlah 169 unit.
- d. Kawasan SMC juga akan dibangun hotel, perkantoran, mall, pusat bisnis hingga hiburan dan wisata.
- e. Harapannya SMC mampu meningkatkan perekonomian di Papua Barat Daya, khususnya dalam mendukung perekonomian dan pertumbuhan bisnis di Kota Sorong.
- f. PT Moderen Multi Graha bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong melakukan peletakan batu pertama pada Rabu, 15 Maret 2023, menandai akan hadirnya ruko di kawasan SMC.
- g. Reklamasi Tembok Berlin Kota Sorong dimulai pada akhir Mei 2017 oleh PT Modern Multi Graha, terindikasi pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 (Perpres 122/2012) tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- h. Rencana reklamasi Pantai Tembok Berlin di Kota sorong sebesar 27 Ha, terbagi menjadi 2 yaitu: Zona Ekonomi Khusus Pemkot Sorong oleh Pihak Ketiga seluas 22 Ha, dan Program Tol Laut oleh Pelindo seluas 5 Ha (diluar DLKr Pelabuhan Sorong)

Rencana reklamasi



Realisasi reklamasi



- i. Dasar regulasi di bidang kelautan dan perikanan adalah:
  - a) PermenKP Nomor 28/PERMEN-KP/2014 “izin lokasi Reklamasi dengan luasan di atas 25 Ha harus mendapatkan rekomendasi Menteri.

- b) PermenKP Nomor 25/PERMEN-KP/2019 "Izin pelaksanaan Reklamasi yang diterbitkan oleh Gubernur dengan luasan di atas 100 Ha wajib mendapat rekomendasi Menteri
- j. Berdasarkan garis pantai Perda 13/2019 tentang RZWP-3-K Provinsi Papua Barat, pada tahun 2018 area reklamasi Sorong Modern City telah masuk ke dalam wilayah perencanaan darat.



- k. Berdasarkan garis pantai Perda 3/2022 tentang RTRW Provinsi Papua Barat, area reklamasi Sorong Modern City masuk wilayah Perencanaan darat.



- l. Berikut hasil kronologi reklamsi SMC sebagai berikut:
- a) Tanggal 15 April 2015 Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Sorong dengan PT Moderen Multi Graha Nomor 650/29APK/205 dan Nomor 00015/PKS/MMG-Pemkot Sorong/IV/2015 tentang Reklamasi Pantai Lido/Dofior/Tembok Berlin kota Sorong;

- b) Tanggal 26 Mei 2015, konsultasi public antara PT. Moderen Multi Graha dengan Pemerintah Kota Sorong dan Masyarakat untuk mendapatkan saran dan masukan terkait AMDAL;
- c) Tanggal 10 Desember 2015 diterbitkan izin Pelaksanaan Reklamasi oleh Walikota Sorong nomor 556/41;
- d) Tanggal 18 Oktober 2016 Peletakan batu Pertama Reklamasi oleh Pemerintah Kota Sorong dan PT. Moderen Multi Graha, Berita Acara Nomor : 650/41A/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- e) Tanggal 02 Desember 2016 Surat Walikota Sorong Nomor 552.4/396 kepada KSOP Kelas I Sorong perihal Permohonan Rekomendasi dan Penyesuaian Titik koordinat;
- f) Tanggal 21 Desember 2016 diterbitkan pertimbangan teknis dari Distrik Navigasi Kelas I Sorong Nomor PR.006/3/1/DNG-SRG-2016 berdasarkan SK Walikota Sorong tentang Tim Teknis Penentuan ulang Titik koordinat Reklamasi Nomor: 800.05/149/2016 tanggal 20 Desember 2016 (hasilnya lokasi reklamasi PT Moderen Multi graha 20 Ha berada di LUAR DLKP/DLKR);
- g) Tanggal 22 Februari 2017, Walikota Sorong menyerahkan lahan 5 Ha kepada PT. Pelindo IV (Persero) cabang Sorong untuk reklamasi dengan dan PMN sedangkan pekerjaan reklamasi ± 20 Ha dilaksanakan oleh PT. Moderen Multi Graha sesuai Surat Keterangan Walikota Sorong Nomor 556/497;
- h) Tanggal 20 Juni 2017 diterbitkan keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP.594 tahun 2017 tentang Surat Izin Kerja reklamasi kepada PT. Pelindo IV (Persero) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Sorong;
- i) Tanggal 13 Desember 2017 diterbitkan izin pelaksanaan reklamasi 20 Ha oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 500/2010/GPB/2017 kepada PT. Moderen Multi Graha;
- j) Tanggal 22 maret 2020 adendum perjanjian Kerjasama antara pemerintah Kota Sorong dengan PT. Moderen Multi Graha atas pengurangan luas lahan semula 25 Ha menjadi 19.781 m<sup>2</sup> atas penyerahan lahan 4 Ha kepada PT. Pelindo IV (Persero);
- k) Tanggal 25 Mei 2021 Surat Walikota Sorong Nomor: 050.13/434 kepada KSOP Kelas I Sorong perihal permohonan rekomendasi

lahan reklamasi seluas 19.781 m<sup>2</sup> berada di luar DLKP/DLKR Pelabuhan Sorong;

- l) Tanggal 8 Juni 2021 surat undangan rapat dari KSOP Kelas I Sorong kepada Distrik Navigasi Kelas I Sorong, PT. Pelindo (Persero) Cabang Sorong dan PT Modern Multi Graha;
- m) Tanggal 09 Juni 2021 Surat KSOP Kelas I Sorong Nomor: UM.003/1/6/KSOP.SRG-2021 kepada Distrik Navigasi hal pertimbangan teknis area reklamasi Pantai Dofior/Lido Kota Sorong seluas 19.781 m<sup>2</sup>;
- n) Tanggal 11 Juni 2021 hasil survey dan pertimbangan teknis dari Distrik Navigasi Nomor : PR.006/1/7/DNG-SRG-2021 menyatakan bahwa area reklamasi PT. Modern Multi Graha 19.781 m<sup>2</sup> berada di luar DLKR/DLKP Pelabuhan Sorong (Sesuai SKB Depdagri dan Dephub tahun 1993 tentang batas-batas DLKR/DLKP Pelabuhan Sorong);
- o) Tanggal 11 Juni 2021 surat KSOP Kelas I Sorong nomor : UM.003/11/14/KSOP.SRG-2021 kepada Walikota Sorong hal rekomendasi area reklamasi Pantai Dofior/Lido kota Sorong yang menjelaskan bahwa area reklamasi PT. Modern Multi Graha seluas 19.781 m<sup>2</sup> berada di Luar dLKR/DLKP Pelabuhan Sorong
- m. Tanggapan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan didampingi oleh Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa kegiatan reklamasi Sorong Modern City sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi hukum.

## 2. Perspektif Analisis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan dokumen lingkungan, kegiatan reklamasi di Sorong Modern City telah mendapatkan izin lingkungan dari Walikota Sorong No. 503/IL/DPMPSTSP/001/VI/2021 atas nama PT.Modern Multi Graha. Izin Lingkungan yang diberikan untuk kegiatan real estate yang dimiliki sendiri atau di sewa. Ruang lingkup izin lingkungan meliputi semua kegiatan yang termasuk dalam dokumen AMDAL, meliputi kegiatan pra konstruksi, konstruksi dan operasional.

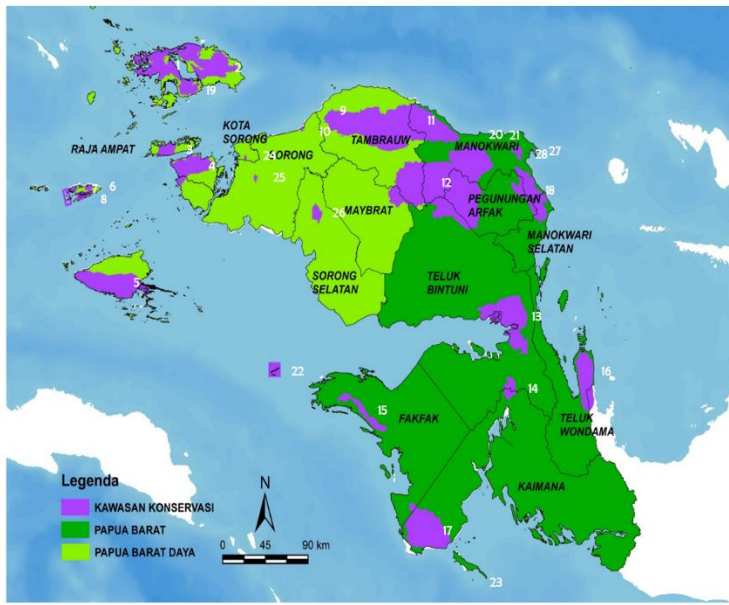
Pada saat di kunjungi lokasi reklamasi belum di lakukan kegiatan konstruksi untuk pembangunan real estate. Baru selesai kegiatan reklamasi.

Tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di wakili oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktur Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan, kegiatan reklamasi sudah mendapatkan izin lingkungan sesuai dengan kewenangan berasal dari Kota Sorong. Namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas terbitnya izin lingkungan, PT Modern Multi Graha harus memiliki izin pembuangan air limbah ke lingkungan dan izin penyimpanan sementara Limbah B3. Karena PT Modern Multi Graha memiliki rencana untuk melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan maka sesuai dengan ketentuan yang ada, perusahaan harus menyusun pertimbangan teknis dan sertifikat layak operasi.

#### **D. TWA Kota Sorong, Papua Barat Daya**

1. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE KLHK untuk menyelenggarakan konservasi di wilayah kerja Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
2. Merupakan UPT setingkat eselon IIB yang memiliki 2 kantor Bidang Wilayah dan 4 kantor Seksi Wilayah. Kantor utama terletak di Kota Sorong (Km.16), Bidang Wilayah I terletak di Kota Sorong (Jalan Baru), Bidang Wilayah II terletak di Manokwari.
3. Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I terletak di Waisai Raja Ampat, SKW II terletak di Teminabuan Sorong Selatan, SKW III terletak di Teluk Bintuni, dan SKW IV terletak di Kaimana.
4. Menyelenggarakan fungsi pengelolaan 28 kawasan konservasi seluas  $\pm 1,7$ jt ha (16-nya ada di Papua Barat Daya  $\pm 800$ rb ha).

# Kawasan Konservasi Papua Barat & Papua Barat Daya



## 18 Cagar Alam

- 1 CA Waigeo Barat
- 2 CA Waigeo Timur
- 3 CA Pulau Batanta Barat
- 4 CA Pulau Salawati Utara
- 5 CA Pulau Misool Selatan
- 6 CA Pulau Kofiau
- 7 CA Pulau Torobi
- 8 CA Laut Kofiau
- 9 CA Pantai Sausapor
- 10 CA Di Atas CA Pantai Sausapor
- 11 CA Pegunungan Tamrau Utara
- 12 CA Pegunungan Tamrau Selatan
- 13 CA Teluk Bintuni
- 14 CA Waqura Kote
- 15 CA Pegunungan Fakfak
- 16 CA Pegunungan Wondiboy
- 17 CA Pegunungan Kumawa
- 18 CA Pegunungan Arfak

## 5 Suaka Margasatwa

- 19 SM Waigeo
- 20 SM Mubrani Kaironi
- 21 SM Sidey Wibain
- 22 SM Sabuda Taturuga
- 23 SM Pulau Venu

## 4 Taman Wisata Alam

- 24 TWA Sorong
- 25 TWA Klamono
- 26 TWA Beriat
- 27 TWA Gunung Meja

## 1 KSA/KPA

- 28 KSA/KPA Hutan Pendidikan Tuanwoli

Luas total :  
1.717.980,74 Ha

Open Area:  
9.715,19 Ha  
(0,57%)

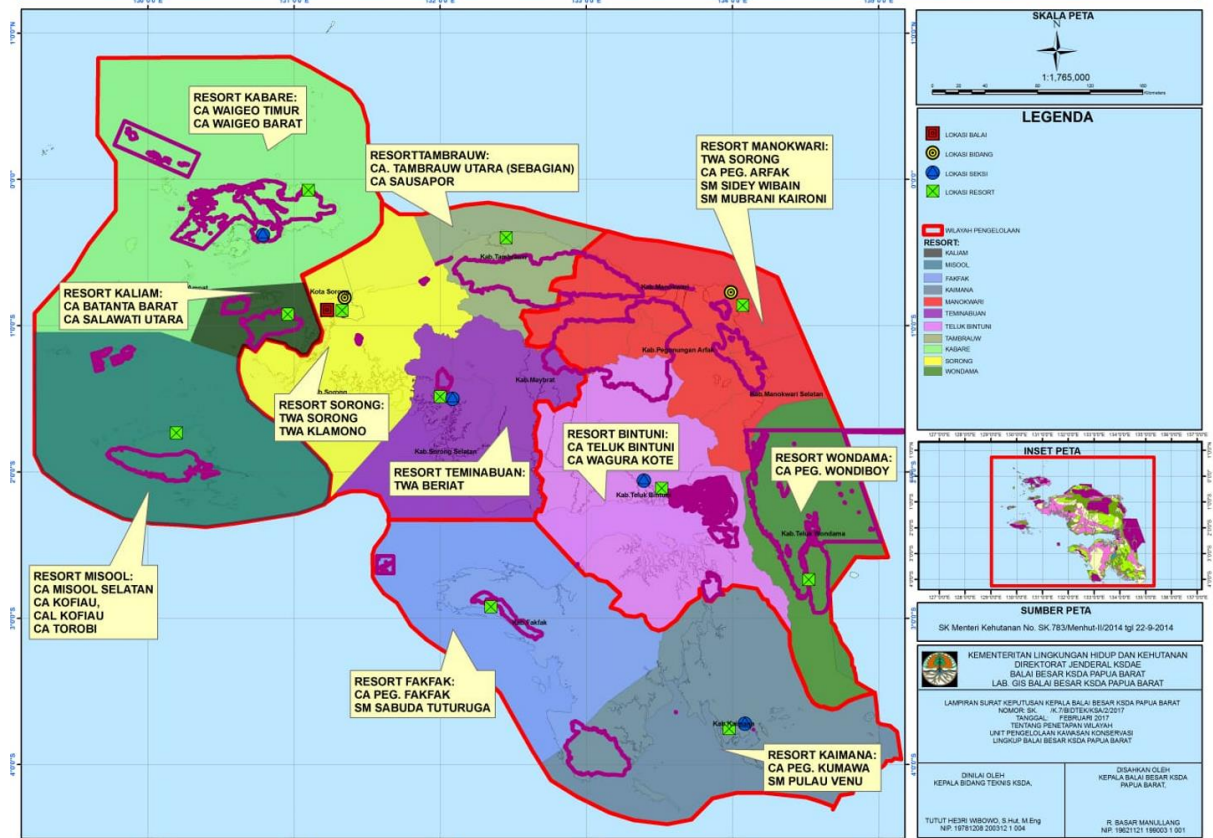
2 Provinsi  
13 Kab/Kota  
≈400 Kampung

111 PNS  
2 Bidwil, 4 SKW,  
12 resort

## Peruntukan:

- Cagar Alam: perlindungan, penelitian, pendidikan, pemeliharaan situs budaya/sejarah, dan pembangunan sarpras pendukung peruntukan.
- Suaka Margasatwa: wisata alam terbatas, perlindungan, penelitian, pendidikan, pemeliharaan situs budaya/sejarah, dan pembangunan sarpras pendukung peruntukan.
- Taman Wisata Alam: wisata alam/pengusahaan pariwisata alam, pemanfaatan oleh masyarakat, perlindungan, penelitian, pendidikan, pemeliharaan situs budaya/ sejarah, dan pembangunan sarpras pendukung peruntukan.

## PETA WILAYAH RESORT KAWASAN KONSERVASI LINGKUP BALAI BESAR KSDA PAPUA BARAT

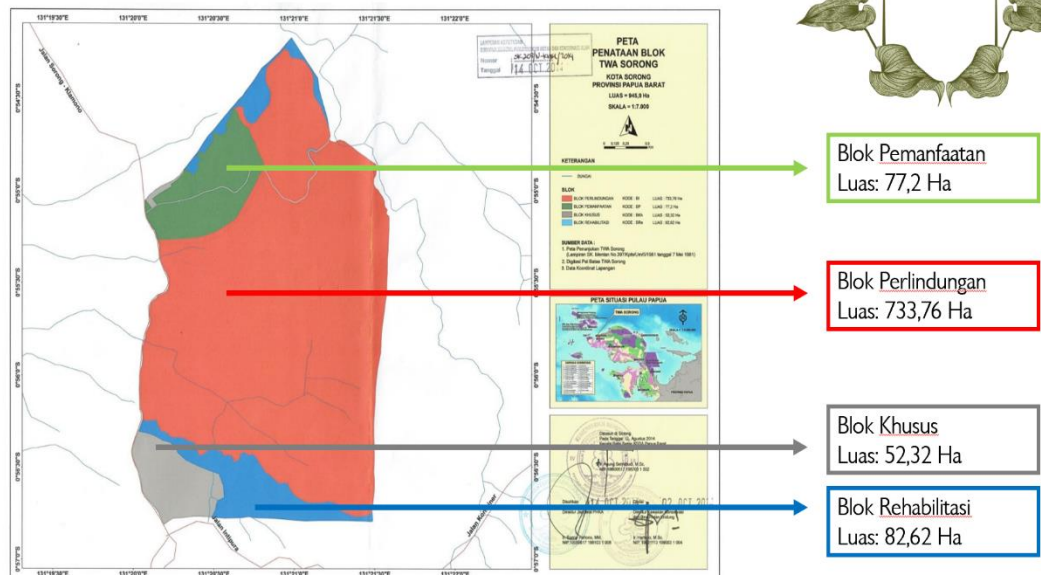




5. Taman Wisata Alam Sorong, terletak di Km.14-18 Kota Sorong, memiliki lokasi strategis hanya  $\pm 7$ km dari Bandara DEO dengan potensi hutan alam yang masih alami di Pusat Kota Sorong. Dapat menjadi tujuan alternatif bagi wisatawan domestik.
6. Spot Wisata di TWA Sorong, Camping Ground, Pengamatan Malam, Outdoor Event, Penelitian dan Pelatihan, Arboretum Anggrek, Nursery, Klinik dan Kandang Satwa, Budidaya Lebah Trigona, Jungle Trekking, Pelepasliaran Satwa, Birdwatching dan Atraksi Budaya.



### PETA PENATAAN BLOK TWA SORONG



7. Kota sorong adalah pintu keluar terakhir bagi penyelundupan tsl melalui jalur udara maupun laut, rute penerbangan dan rute pelayaran kapal dari wilayah Papua dan Papua Barat untuk keluar menuju wilayah tengah dan barat, hampir seluruhnya melalui Kota Sorong (Pelabuhan laut Sorong dan Bandara DEO Sorong) sehingga pengawasan harus selalu diperkuat).

8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana membangun Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan di TWA Sorong menggantikan SMK Kehutanan Manokwari.
9. SMK Kehutanan Negeri Manokwari Saat ini merupakan satu-satunya UPT dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tupoksi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kehutanan di wilayah Papua dan Maluku.
10. Status lahan yg ditempati saat ini masih bermasalah karena adanya tuntutan/gugatan dari yg mengaku sebagai pemilik Hak Ulayat yg sampai saat ini tidak selesai. Hal tersebut berdampak a.l: sulitnya upaya revitalisasi; Kondisi lingkungan sekolah menjadi tidak kondusif dan Beberapa kali terjadi pemalangan yg mengganggu aktifitas pembelajaran; Adanya ancaman-ancaman lainnya baik kepada institusi maupun individu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; Sejak tahun 2008 tidak mengalami perkembangan, baik secara fisik (Fasilitas) maupun SDM
11. Hal ini menyebabkan adanya upaya untuk pindah ke lokasi lain yg lebih kondusif sehingga dipilihlah lahan BBKSDA Papua barat di Sorong dan diusulkan Pembangunan Kampus II SMKKN Manokwari di Sorong lewat Proyek SBSN

PETA RENCANA LOKASI PENEMBANGAN SMK KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI  
DI KABUPATEN / KOTA SORONG



1 : 200

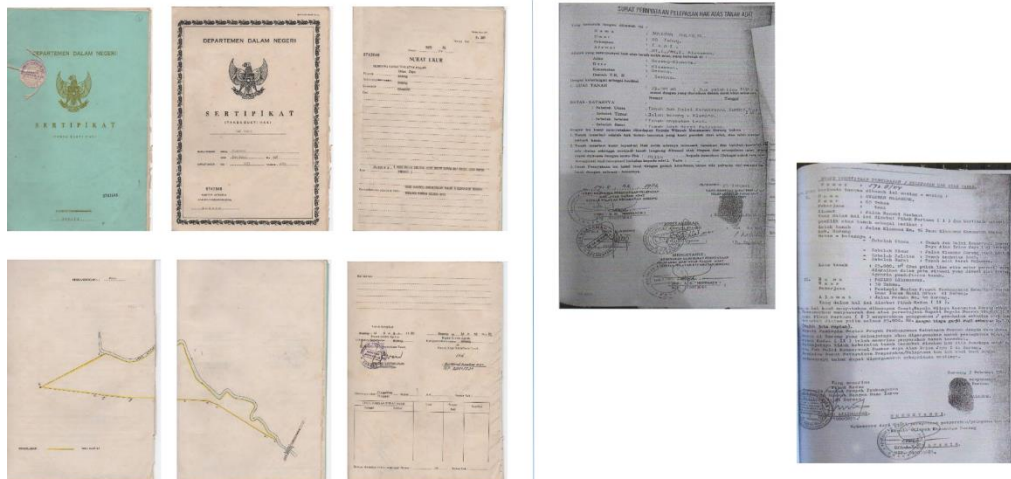


# MATRIKS KESIAPAN PELAKSANAAN

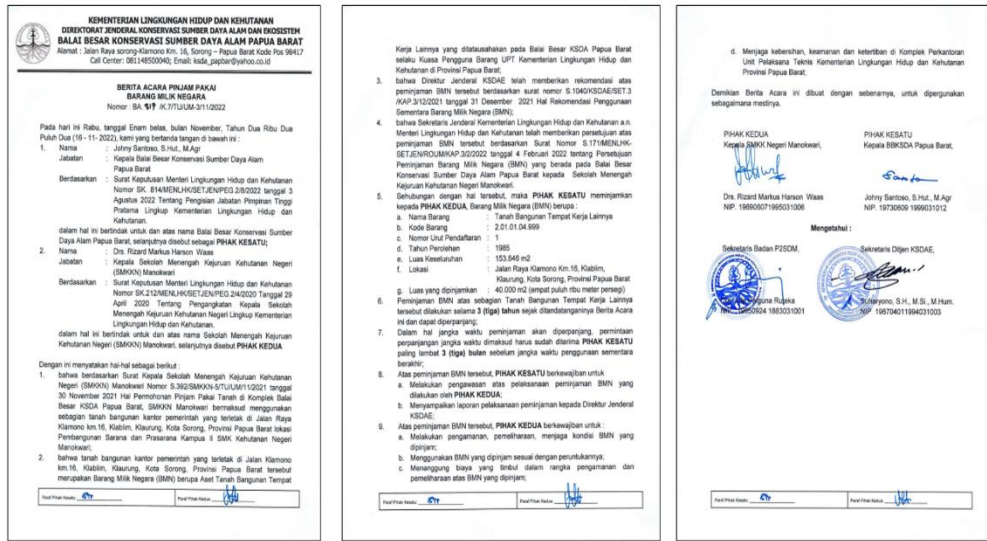
No	Dokumen Kelengkapan	Keterangan
1	KAK, DSKP dan Desain Bangunan	√
2	Ijin UKL-UPL dari dinas PPLH Kota Sorong serta Dokumen Pengelolaan Lingkungan	√ (Nomor 660.1/004-PL/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022)
3	Pendapat Teknis MYC dari Menteri PUPR	√ (Surat Menteri PUPR nomor CK 0401-Mn/2156 tanggal 26 Oktober 2022)
4	Rekomendasi Teknis dari Dinas PUPR Prov. Papua Barat	√ (Kepala Dinas PUPR Prov. Papua Barat nomor 600/642/131/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022)
5	Nomor Register SBSN Proyek MYC dari DJPPR - Kemenkeu	√ M0290823 (Surat Dirjen PPR-Kemenkeu nomor S-40/PR/PR.4/2022 tanggal 19 Agustus 2022)
6	BA pinjam pakai lahan	√ (BA.317/K.7/TU/UM-3/11/2022 tanggal 16 November 2022)
7	Persetujuan MYC dari Menteri Keuangan	√ (Surat Menteri Keuangan Nomor: S.556/MK.2/2022 tanggal 13 Desember 2022)
8	Dokumen pendukung lainnya	√ <u>Surat Pelepasan Adat, Sertifikat Tanah, Rencana Penarikan Dana dan Target waktu Penyelesaian, Panitia/Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Tim pembangunan Kampus II SMKKN Manokwari di Sorong</u>

12. Pelaksanaan pembangunan Kampus II SMKKN Manokwari di Sorong selama 2 tahun anggaran 2023-2024. Diharapkan pembangunan fisik selesai di bulan September 2024. Pada awal tahun 2025, direncanakan SMKKN di Manokwari akan bergeser ke Kota Sorong.

## Sertifikat Lahan dan Surat Pelepasan Adat



## BERITA ACARA PINJAM PAKAI BMN / LAHAN ANTARA BBKSDA PAPUA BARAT DAN SMKKN MANOKWARI



### Diskusi dan Tanggapan Komisi IV DPR RI.

- a. Komisi IV DPR RI mengapresiasi kegiatan konservasi yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Papua Barat dan mendorong agar kegiatan-kegiatan konservasi di lakukan terus menerus dan di kenalkan ke anak-anak sekolah melalui program-program kerjasama dengan sekolah-sekolah.
- b. Pemerintah Daerah Papua Barat Daya (PBD) selaku daerah pemekaran baru meminta agar mendapatkan dana konservasi atau dan untuk menjaga kawasan-kawasan konservasi karena banyaknya kawasan hutan konservasi yang ada di Papua Barat Daya.
- c. Pemerintah Daerah PBD juga berkomitmen untuk menjaga kawasan konservasi yang berada di Provinsi PBD khususnya Taman Wisata Alam Sorong, karena kawasan konservasi di PBD berfungsi selain untuk perlindungan keanekaragaman hayati juga berfungsi sebagai tata air.

### E. Kawasan Budi Daya Cabai Merah di Kelurahan Jaimamo, Kecamatan/Distrik Mariat, Kabupaten Sorong Potensi Hortikultura di Kabupaten Sorong

Potensi penggunaan lahan di Kabupaten Sorong adalah terdiri dari lahan pertanian seluas 3.541 ha, perkebunan seluas 4. 606 ha dan sisanya untuk hutan serta pemukiman warga dan lainnya. Produksi pertanian hortikultura yang

dikembangkan di Kabupaten Sorong adalah Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Rawit, Sayuran Daun, Tanaman Hias dan Tanaman Obat. Pengembangan Hortikultura di Kabupaten Sorong masih menemui banyak tantangan, sehingga butuh banyak upaya dan perhatian dari berbagai pihak baik pusat maupun daerah. Berikut adalah data terkait keadaan luas panen, produksi dan produktivitas cabai besar dan cabai rawit di Kabupaten Sorong tahun 2019-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Cabai Besar Kabupaten Sorong**

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2019	28	121	750	6,2
2020	107	231	1478	6,4
2021	83	181	1243	6,9
2022	81	99	600	6,1

Sumber: ATAP 2019-2022

**Tabel 2. Data Cabai Rawit Kabupaten Sorong**

No	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	2019	141	419	2508	6,0
2	2020	316	708	4312	6,1
3	2021	168	521	3247	6,2
4	2022	166	274	1825	6,7

Sumber: ATAP 2019-2022

Adapun alokasi APBN Direktorat Jenderal Hortikultura 2021-2023 Pengembangan hortikultura berasal dari APBN Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian yang terdapat di Kabupaten Sorong, dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) dan APBN pusat ke kelompok tani. Gambaran alokasi kegiatan dari Direktorat Jenderal Hortikultura di Kabupaten Sorong sebagai berikut:

**Tabel 3. Alokasi Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura**

Provinsi	Kabupaten	Tahun	Fasilitasi ABPN	Luas (ha)
Papua Barat Daya	Sorong	2023	Kawasan Cabai Reguler	20
			Kawasan Bawang Merah	10

Sumber: Ditjen Hortikultura Tahun 2023

Pada saat kunjungan, Tim Komisi IV DPR RI Anggota Komisi IV DPR RI mendapatkan gambaran bahwa cabai yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten Sorong, sudah dapat memenuhi kebutuhan cabai kota dan kabupaten Sorong. Selain itu petani cabai telah menggunakan sistem Smart Farming, yang dapat mengatur kebutuhan frekuensi produksi cabai disetiap musim guna mencegah jatuhnya harga cabai. Meskipun demikian masih banyak cabai yang terkena jamur sehingga menjadi gagal panen, sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah. Beberapa aspirasi yang disampaikan adalah, bantuan untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier/saluran di talud. Kemudian meminta bantuan ternak sapi, embung, pompa air, cultivator, pupuk, kendaraan roda tiga. Hal lain yang disampaikan dalam diskusi berkaitan dengan status penyuluh, meminta ada perbaikan biaya BPP untuk penyuluh.

Selain itu petani mendapatkan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Menanggapi beberapa aspirasi, Komisi IV DPR RI menyampaikan agar Kementerian Pertanian menindaklanjuti permintaan yang disampaikan, dan mengalokasikan baik tahun 2023 maupun 2024. Terkait bantuan ternak, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menindaklanjutinya dengan pemberian bantuan UPPO sebanyak 1 (satu) unit.



Kemudian berkenaan dengan pupuk bersubsidi, disampaikan oleh pihak PT Pupuk Indonesia, bahwa alokasi untuk papua barat daya turun, hanya  $\frac{1}{4}$  dari

tahun sebelumnya. Untuk itu meminta dinas pertanian untuk segera melakukan pengajuan pupuk bersubsidi, selain itu akan diberikan bantuan sebanyak 500 kg NPK dan 1 ton urea dari PT Pupuk Indonesia. Pada saat diskusi terungkap bahwa penyuluh di Kabupaten Sorong belum menerima bantuan pulsa. Hal ini mendapatkan kritik keras dan akan dibahas dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat terdekat.

#### **F. Penyelesaian Kegiatan yang Terbangun dalam Kawasan Hutan di Papua Barat Daya**

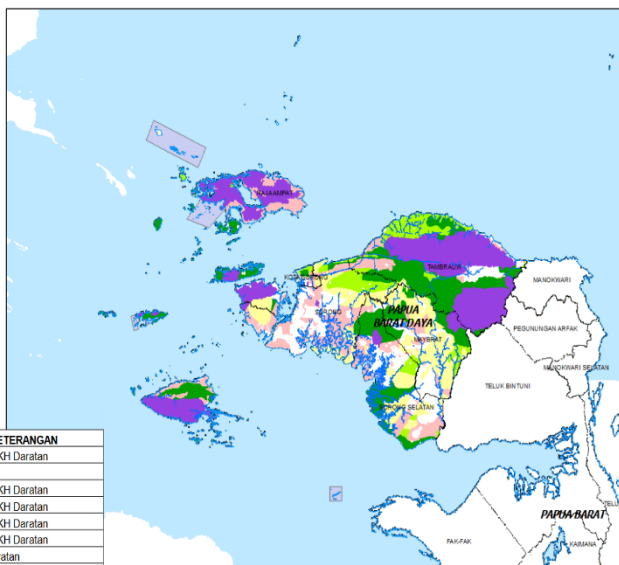
Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melakukan diskusi penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun bersama pemerintah daerah dan subyek hukum yang melakukan kegiatan.

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas  $\pm$  40.591.580 Ha ( empat puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh hektar) sebagai kawasan hutan.
2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas  $\pm$  42.224.840 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) Hektare.
3. Keputusan Menhut No SK.710/Menhut-II/2014 tgl 27 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  243.045 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  438.220 hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan
4. Keputusan Menhut No SK.783/Menhut-II/2014 tgl 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.
5. Keputusan MenLHK No SK.2662/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tgl 20 April 2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat sampai dengan Tahun 2016.
6. Keputusan MenLHK No SK.6620/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tgl 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat sampai dengan Tahun 2020.

## KAWASAN HUTAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

### Fungsi Kawasan Hutan :

- Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi di-Konversi
- Areal Penggunaan Lain
- Tubuh Air



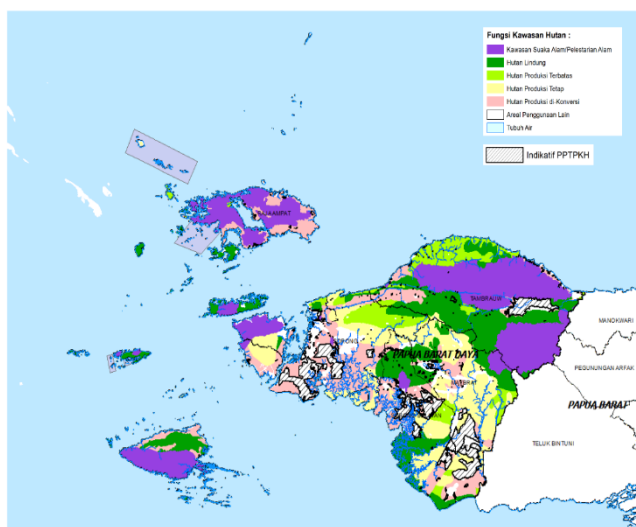
NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS (Ha)	PERSEN (%)	KETERANGAN
1	KSA/KPA	995.540,91	29	Persentase KH Daratan
2	KSA/KPA Perairan	204.218,70		
3	HL	771.552,07	23	Persentase KH Daratan
4	HPT	306.082,04	9	Persentase KH Daratan
5	HP	600.537,29	18	Persentase KH Daratan
6	HPK	732.213,62	21	Persentase KH Daratan
	Jumlah KH Daratan (83,27%)	3.405.925,94	100	Luas KH Daratan
	Jumlah KH Perairan (4,99%)	204.218,70		
	Jumlah KH Daratan + Perairan	3.610.144,64		
7	APL (10,61%)	433.853,27	11	Persentase APL thd luas Provinsi
8	Tubuh Air (1,13%)	46.230,33		
	Total Luas Provinsi (Tanpa KH Perairan)	4.090.306,30	100	Luas Provinsi

\*batas wilayah administrasi yang digunakan mengacu pada batas administrasi RBI Tahun 2018

## 7. Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

### PETA INDIKATIF PENYELESAIAN PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN

(Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tanggal 27 Februari 2023)



NO	KRITERIA PPTPKH	LUAS (Ha)
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan (239.781 Ha*)	47.956
2	Kawasan HPK tidak produktif	12.929,27
3	Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak	1.433,61
4	Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk transmigrasi	2.505,08
5	Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum	10.883,06
		75.507,02

### LUAS INDIKATIF PENYELESAIAN PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN PER KABUPATEN

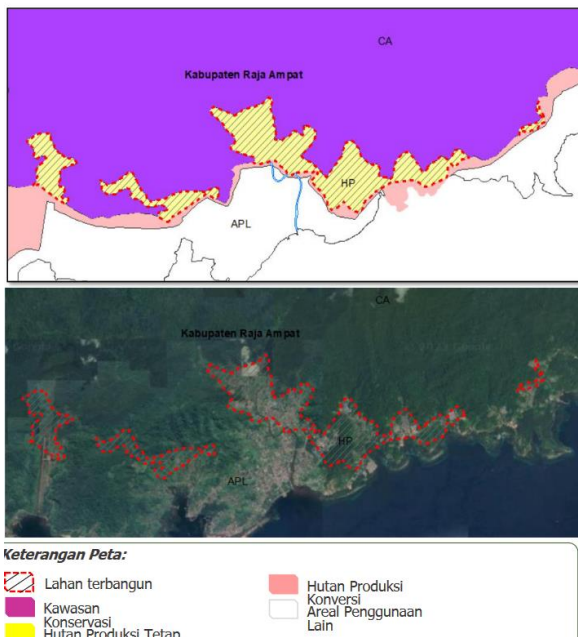
(Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.903/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tanggal 27 Februari 2023)

NO	KRITERIA PPTPKH	LUAS PPTPKH PER KABUPATEN* (Satuan Hektar)						TOTAL (Ha)
		Kota Sorong	Maybrat	Raja Ampat	Sorong	Sorong Selatan	Tambrau	
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan		7.261,54		15.829,26	18.388,42	6.476,97	47.956
2	Kawasan HPK tidak produktif		1.839,19	1.467,98	1.692,56	4.787,35	3.142,21	12.929,27
3	Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak		284,35		133,48	39,17	976,62	1.433,61
4	Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk transmigrasi				1.435,49	1.069,59		2.505,08
5	Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum	2.173,43	1.755,24	1.018,08	1.727,11	1.411,34	2.597,86	10.883,06
	<b>Grand Total</b>	<b>2.173,43</b>	<b>11.140,32</b>	<b>2.486,06</b>	<b>20.817,90</b>	<b>25.695,87</b>	<b>13.193,66</b>	<b>75.507,02</b>

\* Luas dihitung secara digital ArcGIS menggunakan batas administrasi yang bersumber dari IGD BIG 2018



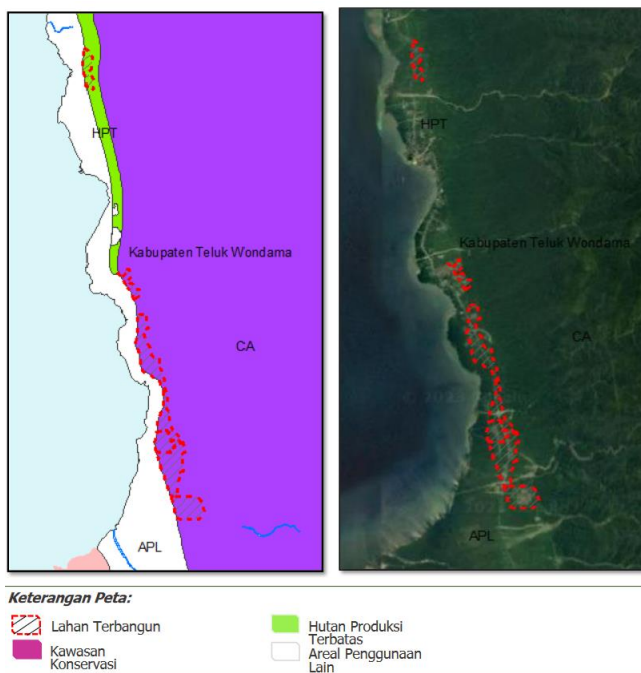
### 3C. DATA ASET PEMERINTAH DI DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN MENTERI



#### 1. Kabupaten Raja Ampat

Aset Pemerintah Daerah yang terbangun di dalam Kawasan Hutan seluas ± 574 Hektar antara lain

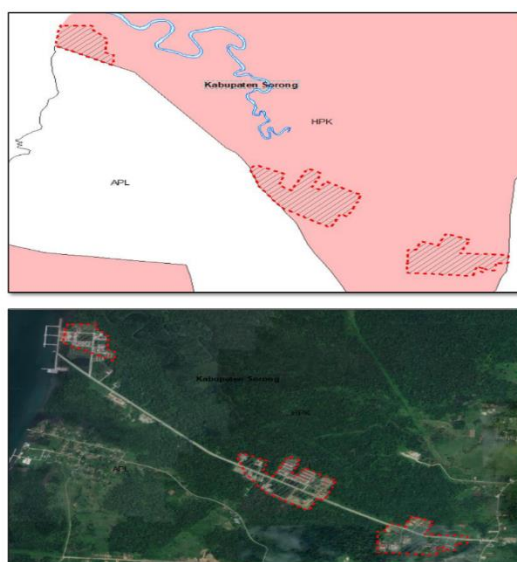
1. Kantor Bupati
2. Rumah Sakit
3. Perumahan Pemda
4. Stadion Sepak Bola
5. Bandar Udara
6. Pemukiman Masyarakat



#### 2. Kabupaten Teluk Wondama

Aset Pemerintah Daerah yang terbangun di dalam Kawasan Hutan Seluas ± 388 Hektar antara lain :

1. Kantor Bupati
2. Perumahan Pemda
3. SPBU
4. Pemukiman Masyarakat



#### 3. Kabupaten Sorong

Aset Pertahanan Keamanan (Koarmada III Sorong) Seluas ± 75 Hektar

1. Mako Brigif 3
2. Balai Kesehatan
3. Batalyon Infanteri 11 Marinir
4. Kompi B Yonif 11 Marinir
5. Mako Menbanpur 3 Marinir
6. Pusdiklat TNI AL
7. Batalyon Zeni 3 Marinir
8. Dermaga Koarmada III



### III. KESIMPULAN

Dari Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya, didapatkan berbagai catatan sebagai berikut:

- A. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (persero) dan ID Food untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam rangka menjaga pasokan pangan dengan harga yang terjangkau, serta dalam upaya peningkatan produksi pertanian di Indonesia,
- B. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq. Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, dan ID Food untuk menindaklanjuti hal-hal yang menjadi masukan dan aspirasi dari masyarakat, diantaranya bantuan embung, pompa air, kultivator, kendaraan roda tiga UPPO, pupuk bersubsidi, hingga masalah status tenaga penyuluh dan perbaikan biaya BPP untuk penyuluh.
- C. Komisi IV DPR RI mengkritisi terkait terdapat penyuluh pertanian yang belum mendapatkan bantuan pulsa untuk mendukung kegiatan penyuluh.
- D. Komisi IV DPR RI mendukung terselesainya peralihan pemerintahan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua Barat Daya terkait, khususnya aset sarana perasarana, pegawai/SDM dan lain-lain.
- E. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu nelayan melalui program prioritas di c.q Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Berupa alat tangkap ikan, perbaikan atap TPI Klaligi yang rusak, cool box, pembangunan tempat pertemuan di kampung nelayan beserta penerangan listrik dan jalan kampung jembatan puri.
- F. Komisi IV DPR RI mendukung kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Provinsi Papua Barat Daya dan mendorong pelibatan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam melakukan kegiatan konservasi di Provinsi Papua Barat Daya.
- G. Komisi IV DPR RI mendukung penyelesaian aset-aset pemerintah yang sudah terbangun dalam kawasan hutan milik pemerintah termasuk TNI dan Polri dalam waktu segera agar memberikan kepastian hukum dan untuk pengembangan masa depan.

- H. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan pengawasan atas kepatuhan para pemegang izin atau persetujuan lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat Daya dan segera melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin atau pelanggar lingkungan tanpa izin.
- I. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pelatihan/bimtek di c.q Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing kepada ibu-ibu nelayan/pengolah perikanan Kota Sorong agar berdaya saing dan bernilai tambah guna kesejahteraan rakyat kelautan perikanan.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2023  
Ketua Tim,

Sudin, S.E.  
A-151

## DOKUMENTASI





## MEDIA

1. <https://papuabaratdayaprov.go.id/berita/84/komisi-iv-dpr-ri-lakukan-kunker-ke-papua-barat-daya.html>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46993/t/Legislator%20Minta%20Pemerintah%20Beri%20Bantuan%20ke%20Petani%20di%20Sorong>
3. <https://badanpangan.go.id/blog/post/tinjau-gudang-bulog-papua-barat-daya-bersama-dpr-nfa-pastikan-cbp-cukup-untuk-kelancaran-program-pemerintah>
4. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46960/t/Komisi+IV+Apresiasi+Kebersihan+Tempat+Pelelangan+Ikan+dan+Dengar+Keluhan+Nelayan+di+Sorong>
5. <https://portal.beta.rri.co.id/daerah/386761/kunker-ke-papua-barat-daya-komisi-iv-dpr-ri-berdialog-dengan-nelayan-kota-sorong>
6. <https://papuabaratdayaprov.go.id/berita/84/komisi-iv-dpr-ri-lakukan-kunker-ke-papua-barat-daya.html>
7. <https://www.klikpendidikan.id/news/35810415517/ketua-komisi-iv-dpr-ri-memberikan-apresiasi-kebersihan-tempat-pelelangan-ikan-di-sorong-papua-barat>
8. <https://lampung77.com/nusantara/kunjungi-sorong-papua-ketua-komisi-iv-dpr-sudin-tinjau-tpi-dialog-dengan-nelayan/>
9. <https://sindikatpost.com/2023/10/06/dpr-ri-sudin-berikan-apresiasi-pada-masyarakat-nelayan-atas-kebersihan-tpi/>
10. <https://papuabaratdayaprov.go.id/berita/84/komisi-iv-dpr-ri-lakukan-kunker-ke-papua-barat-daya.html>
11. <https://bbksda-papuabarat.com/kunjungan-kerja-dpr-ri-komisi-iv-di-kota-sorong/>